



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

REKAMCAJAK KERJA

2025



(1265) 7500 641 / 7500 643
dinaskpkp@gmail.com
Jl. Raya Cijulang Np. 345, Cibenda, Parigi, Pangandaran



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Raya Cijulang Nomor 345, Cibenda, Parigi, Kode pos 46394
Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email: dinaskpkp@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

NOMOR : 800/KPTS.390/DKPKP.I/VI/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu)

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2025
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Penyusunan RENJA pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.
- b. Untuk kelancaran dan tertibnya administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

- Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

- 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
- 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
- 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- KETIGA
- :
- :
- :
- : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- : Melaksanakan tugas menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

DITETAPKAN DI : Parigi
PADA TANGGAL : 24 Juni 2024

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran



SARLAN, S.I.P.
Pembina, IV/a
NIP. 19780612 200801 1 007

- Tembusan Yth:
- 1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangandaran.
 - 2. Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan,
Perikanan dan Ketahanan Pangan
NOMOR : 800/KPTS.390/DKPKP.I/VI/2024
TANGGAL : 24 Juni 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sarlan, S.IP. (Kepala Dinas)
- II. KOORDINATOR : Herdis, S.St.Pi. (Plh. Sekretaris Dinas)
- III. SUB KOORDINATOR : Jamaludin, S.Pi. (Plh. Perencanaan)
- IV. ANGGOTA :
 - 1. Herdis, S.St.Pi. (KABID Budidaya Perikanan)
 - 2. Ridwan Mulyadi, S.Hut., M.M. (KABID Perikanan Tangkap)
 - 3. Aisah, S.T. (Plh. KABID Ketahanan Pangan)

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran


SARLAN, S.IP.
Pembina, IV/a

NIP. 19780612 200801 1 007



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran (DKPKP) Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2025 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA Dinas periode ke-5 dan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40).

dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021-2024 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/ kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Parigi, 1 Juli 2024
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

SARLAN, S.IP.
Pembina/Iva
19780612 122008011007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBAR..... iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.2. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 1

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 7

 1.4. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
 Renstra Perangkat Daerah..... 9

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 11

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .. 11

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 13

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 15

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah..... 15

 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 18

 3.3. Program dan Kegiatan..... 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

BAB V PENUTUP 23



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun 2024 dan pencapaian Renja perangkat daerah Tahun 2024 ... 9

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas /kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proyek Prioritas Strategis15

Gambar 2. Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman16



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel T-C 29.....25

Lampiran 2 Tabel T-C 31.....26

Lampiran 3 Tabel T-C 30.....27

Lampiran 4 Tabel T-C 3233

Lampiran 5 Tabel T-C 33.....34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja perangkat daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 periode ke-5 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang



- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);



42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
49. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Nomor: 050/711/Kpts.-DKPKP.I/X/2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam



pembangunan daerah khususnya lingkup Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

2. Tujuan

- a. Menyediakan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. Penutup



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Bulan Juni Tahun 2024 sebagaimana Tabel T-c.29 sebagaimana lampiran 1.
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 22.099.357.019,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan sampai Bulan Juni Tahun 2024 Rp. 8.288.403.989,- atau sebesar 37,51%.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pencapaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun 2024 dan pencapaian Renja perangkat daerah Tahun 2024

PROGRAM/SUB KEGIATAN	BELANJA		
	ANGGARAN	REALISASI	
		KEU (RP)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.629.810.051	2.333.259.092	50,39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.498.600	14.110.200	27,94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.990.000	7.928.000	33,04
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.739.454.279	1.885.767.857	50,42
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.800.000	12.150.000	38,20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.981.099	0	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	998.600	0	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.498.599	12.047.500	39,50
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	29.605.000	11.900.000	40,19
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.743.600	0	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.659.004	745.000	9,72
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.846.380	81.688.500	87,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.914.100	6.502.000	17,61
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.520.426	499.800	11,06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.912.949	6.225.000	34,75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.608.750	20.061.129	44,97



Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.370.000	150.000	6.33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.897.082	36.637.106	45.29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.630.075	64.052.800	31.61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	52.255.684	16.900.200	32.34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.415.586	5.013.000	32.52
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.210.238	150.891.000	94.18
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.209.125.800	199.792.800	16.52
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.209.125.800	199.792.800	16.52
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	92.651.667	15.149.400	16.35
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	34.737.500	7.757.000	22.33
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	57.914.167	7.392.400	12.76
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	68.235.800	16.605.000	24.33
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	68.235.800	16.605.000	24.33
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	7.449.500	2.831.800	38.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	7.449.500	2.831.800	38.01
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.907.417.929	3.598.639.292	73.33
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.597.991.192	944.991.192	59.14
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.492.300.000	2.485.000.000	99.71
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	87.333.332	18.203.000	20.84
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	729.793.405	150.445.100	20.61
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.498.161.272	2.122.126.605	20.21
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	13.320.600	12.320.600	92.49
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.850.000.000	0	0,00
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.400.000	4.400.000	100
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.484.811.850	1.743.534.850	31.79
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	104.866.667	25.669.000	24.48
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	2.704.560.000	00	0,00
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	336.202.155	336.202.155	100
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA	6.750.000	0	0,00



KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	6.750.000	0	0,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASILPERIKANAN	679.755.000	0	0,00
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.755.000	0	0,00
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	0	0,00
TOTAL	22.099.357.019	8.288.403.989	37,51

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolak ukur dan indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagaimana dituangkan pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja yang disajikan tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Target Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2024 diukur dari 2 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase kontribusi sektor perikanan (miliar rupiah) dan Skor Pola Pangan Harapan (skor). Informasi lebih lengkap disajikan pada tabel T-C 30 sebagaimana lampiran 2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan memiliki lingkup pelayanan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan. Sebagai lembaga dengan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang Perikanan dan kelautan serta pangan, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Bidang Ketahanan Pangan.

Tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana identifikasi isu-isu penting sektor Perikanan dan ketahanan pangan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ketidakpastian produksi ikan tangkap
- Ketidakpastian produksi tangkapan ikan karena ketidakpastian cuaca, cuaca yang ekstrim, ketidakpastian arah angin dan gelombang, juga



dikarenakan sarana prasarana penangkapan ikan belum memadai seperti armada penangkapan ikan masih kecil (di bawah 5 GT), pengetahuan dan keterampilan nelayan terbatas.

- 2) Masih kecilnya PAD dari sektor perikanan
PAD dari sektor perikanan bersumber dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Masih adanya transaksi penjualan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan di luar TPI yang menyebabkan belum maksimal/optimalnya PAD sektor perikanan.
- 3) Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana
Belum Optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- 4) Belum Valid dan Akuratnya Pendataan Nelayan dan Armada Penangkapan Ikan
- 5) Pendataan nelayan dan armada penangkapan ikan, sehingga tercipta data base yang akurat. Data base tersebut dapat bermanfaat diantaranya untuk pembuatan KUSUKA dan Asuransi Nelayan.
- 6) Belum tersedianya benih dan induk ikan yang berkualitas sehingga perlu operasionalisasi Balai Benih Ikan (BBI) dalam rangka memenuhi ketersediaan benih dan induk ikan yang berkualitas.
- 7) Potensi pengembangan pasar ikan dalam rangka pengelolaan dan manajemen pemasaran hasil budidaya perikanan.
- 8) Informasi harga pasar benih dan ikan konsumsi air tawar belum stabil, sehingga perlu standarisasi harga oleh instansi terkait
- 9) Peningkatan kapasitas produksi ikan melalui bantuan benih ikan, calon induk ikan, pakan dan penataan kelompok.
- 10) Pemberdayaan kelompok perikanan melalui pembinaan dan pengembangan kelompok perikanan.
- 11) Menurunnya populasi ikan dan udang di perairan umum sehingga perlu dilakukan restocking ikan/udang di perairan umum
- 12) Pengembangan kapasitas kelompok dalam rangka ketersediaan pakan ikan mandiri melalui pelatihan dan bantuan sarana pembuatan pakan ikan.
- 13) Belum adanya forum kelompok pembudidaya ikan, sehingga perlu adanya suatu wadah untuk diskusi dan tukar menukar informasi antar pokdakan.
- 14) Pembinaan kelompok pembudidaya ikan agar berbadan hukum untuk menjamin legalitas hukum kelompoknya.
- 15) Di musim penghujan yang terus menerus semua pembudidaya berhati-hati timbulnya penyakit, upayakan untuk menjaga kualitas air dan kesehatan lingkungan.



- 16) Belum adanya suatu kajian dalam bentuk FS/DED terkait potensi pengembangan perikanan budidaya tawar, payau, laut di setiap kecamatan.
- 17) Lemahnya akses pangan masyarakat sehingga perlu pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah.
- 18) Pemantauan harga dan pasokan pangan pokok secara berkelanjutan untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan mengatasi fluktuasi harga.
- 19) Mengatasi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras melalui Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal.
- 20) Masih ditemukannya ketidakamanan pangan sehingga perlu pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik tingkat produsen maupun konsumen.
- 21) Melakukan pengembangan kelembagaan cadangan pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.
- 22) Melakukan antisipasi dan penanganan situasi yang berpotensi terjadinya rawan pangan dan gizi.
- 23) Melakukan terobosan peningkatan akses pangan melalui perbaikan distribusi pangan yang efektif dan efisien.
- 24) Mensosialisasikan Pola konsumsi pangan yang beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) hingga tingkat rumah tangga dalam upaya pencegahan stunting.
- 25) Perlu adanya penguatan pangan melalui infrastruktur pasca panen.
- 26) Dalam rangka antisipasi dampak el-nino perlu adanya sosialisasi dan gerakan stop boros pangan untuk meminimalisir terjadinya food loss dan food waste.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Pada prosesnya review/penyempurnaan dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, maka fungsi dan tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terkait erat dengan pencapaian misi Kabupaten ke-4 yaitu Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal.



Hasil review dan analisa terhadap Rancangan Awal Renja tahun 2025, sebagaimana tersaji pada Tabel T-C.31 (lampiran 3).

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD menunjukkan bahwa analisis kebutuhan perangkat daerah (Rp 17.383.364.183,00). Perbedaan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya pada Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada Musrenbang Kecamatan ada beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan selaku Perangkat Daerah, terdiri dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah kabupaten.

Adapun usulan yang disampaikan pada saat pembahasan dapat diakomodir dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Usulan-usulan program/kegiatan yang terkait dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi yang termuat pada hasil Musrembang Kecamatan yang totalnya sebanyak 4 usulan dengan nilai Rp 2.338.200.000,- Selanjutnya tersaji pada Tabel T-C.32 sebagaimana lampiran 4.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2021-2026 adalah :

“PEMANTAPAN PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING DAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu :

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Proyek prioritas strategis (*Major Project*) RPJMN 2021-2024 ditunjukkan dalam Gambar berikut.



Gambar 1. Proyek Prioritas Strategis
Sedangkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan kemaritiman dan kelautan ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu **"Peningkatan kualitas infra struktur dasar dan Pemulihan Kesehatan Fiskal menuju Pangandaran Juara"**

Selanjutnya ada 5 misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah provinsi jawa barat tahun 2018-2024 yang terdiri dari :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada program prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat terdapat pada misi 4 dengan sasaran 1 “Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan” dengan indikator kinerja sasaran yaitu “nilai tukar petani (NTP)” dan memiliki arah kebijakan yaitu Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Adapun Strategi yang tertera dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 yaitu Mengembangkan inovasi untuk peningkatan



produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Sedangkan Program yang tertera dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 yaitu:

1. Laut Juara

- a. Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K Jawa Barat
- b. Pendayagunaan Masyarakat Pesisir dalam Rehabilitasi Kawasan Terumbu Karang dan Kawasan Mangrove serta Pengelolaan Sampah Laut (*Marine Debris*)
- c. Pelestarian Plasma Nutfah;
- d. Peningkatan kompetensi SDM, sarana, prasarana dan operasional pengawasan SDKP.

2. Nelayan Juara

- a. Sertifikasi Kompetensi Nelayan dan Asuransi Nelayan
- b. Sertifikasi Kompetensi Pembudidaya Ikan dan Asuransi Usaha Budidaya
- c. Sertifikasi Kompetensi UPI dan Pemasar Hasil Perikanan
- d. Peningkatan Kompetensi petambak garam
- e. Peningkatan Manajemen Usaha Kelautan dan Perikanan

3. Gudang Ikan Juara

- a. Peningkatan Operasional Pelabuhan Perikanan;
- b. Peningkatan sarana dan teknologi perikanan tangkap;
- c. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Perikanan Budidaya
- d. Revitalisasi Tambak Wilayah Utara dan Akselerasi Tambak Wilayah Selatan
- e. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Produksi Garam
- f. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Distribusi, Pengolahan, serta Pemasaran Hasil Perikanan
- g. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan
- h. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Akses Permodalan

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program/kegiatan perangkat daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan maka Kebijakan Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Dimensi Pembangunan Sektor Kedaulatan Pangan dan Sektor Kemaritiman. Adapun fokus pembangunan tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pangandaran yaitu Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Perlindungan Sosial yang



Berkeadilan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yaitu " **Peningkatan Kualitas Infra Struktur Dasar dan Pemulihan Kesehatan Fiskal menuju Pangandaran Juara** " sehingga fokus program kegiatan tahun 2024 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan juga dalam rangka mendukung arah kebijakan kabupaten tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pangandaran, focus pembangunan tahun 2024 adalah "**Peningkatan Kualitas Infra Struktur Dasar dan Pemulihan Kesehatan Fiskal menuju Pangandaran Juara**". Prioritas pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan, Program PD 2 Diantaranya:
 - a. Peningkatan Insfrastruktur Pertanian
 - b. Meningkatkan Intensitas Produksi
 - c. Pemberian Dukungan Subsidi dan Insentif
 - d. Penyediaan Akses Pasar
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan, Program PD 3 diantaranya:
 - a. Pengembangan Lumbung Pangan
 - b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan
 - d. Peningkatan Diversifikasi Pangan

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran melaksanakan 2 urusan, yaitu Urusan Pangan dan Urusan Kelautan/Perikanan, sehingga program kegiatan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran mendukung prioritas ke-2 (Terwujudnya kesejahteraan petani dan nelayan) dan prioritas ke-3 (Meningkatnya ketahanan pangan).

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, tujuan rencana kerja tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran 2021-2026 adalah: Meningkatkan Produktivitas Perikanan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dari tujuan dalam rencana kerja 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
TUJUAN: Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Miliar Rupiah)	73.28
	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	84
Sasaran 1.1. Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0.5
Program 1.1.1. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	0,3
Program 1.1.2. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	0,2
Program 1.1.3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan (%)	5
Program 1.1.4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Penyediaan Pasar Terhadap Produksi Hasil Perikanan (%)	90
Sasaran 1.2. Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	90
Program 1.2.1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan (%)	8
Program 1.2.2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)	2100
	Angka Kecukupan Protein (gr.kapita)	57
Program 1.2.3. Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan (%)	2
Program 1.2.4. Pengawasan Kerawanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman (%)	70
TUJUAN: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Nilai SAKIP	76,25 - 81,00
Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	89.95
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi (%)	90

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 mencakup 8 Program dan 28 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp 17.383.364.183,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 tersebut merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun lalu yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel T-C 33 (lampiran 5).



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja perangkat daerah (Renja) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang berisi program dan kegiatan serta pagu anggaran.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tanggal 05 Juli 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dengan menyusun kebijakan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang-bidang maupun dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan (MUSRENBANG), rapat koordinasi maupun penggalan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 direncanakan akan melaksanakan 1 urusan



wajib dan 1 urusan pilihan serta kesekretariatan. Anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 17.383.364.183,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kesekretariatan Rp. 4.792.437.183,-
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp. 643.000.000,-
 - c. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp. 11.947.927.000,-
- Program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 tersebut, antara lain :

Kode Rekening				Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.792.437.183
2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	575.000.000
2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.000.000
2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	500.000.000
2	9	3	2,04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	50.000.000
2	9	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000
2	9	4	2,02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
2	9	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	18.000.000
2	9	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.438.097.771
3	25	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.792.437.183
3	25	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.310.000
3	25	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.814.637.183
3	25	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.434.000
3	25	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.000.000
3	25	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.256.000
3	25	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.800.000
3	25	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.461.483.500
3	25	3	2,01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	2.365.000.000



				Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
3	25	3	2,02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
3	25	3	2,03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.066.483.500
3	25	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.771.277.000
3	25	4	2,02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.850.000.000
3	25	4	2,04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5.921.277.000
3	25	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	680.000.000
3	25	6	2,03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	680.000.000
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.166.500
3	25	05	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	35.166.500
TOTAL					17.383.364.183



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-5, periode renstra 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Pangandaran dan sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pada rencana kerja serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, seluruh aparatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



Dengan telah disusunnya Rencana Kerja tahun 2025, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder, selanjutnya rencana kerja ini untuk digunakan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025.

Parigi, 1 Juli 2024
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran



SARLAN, S.IP.
Pembina/Iva
19780612 122008011007



Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan		
	1	2	3				4	5	6		7	8=(7/6)	9
2	9	2	PROGRAM PENGELOAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	8%	8%	8%	1%	13%	8%	0%	0%	
2	9	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200%	1 dokumen	1 dokumen	17%	
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Protein	2100 angka 57 angka	2100 angka 57 angka	2100 angka 57 angka	2180 angka 62 angka	104% 109%	2100 angka 57 angka	0 0	0% 0%	
2	9	3.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0	0%	
2	9	3.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	0	0%	
2	9	3.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200%	1 dokumen	0	0%	
2	9	4	PROGRAM PENANGKATAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	1%	5%	4%	2,1%	53%	3%	0%	0%	
2	9	4.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	0	0%	
2	9	4.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	100%	2 dokumen	0	0%	
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	75%	55%	60%	69,8%	IVALLUE	65%	0%	0%	
2	9	5.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen	0	0%	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%	90% 90% 90% 90%	90% 90% 90% 90%	90% 90% 90% 90%	100% 100% 100% 100%	90% 90% 90% 90%	33% 22% 15% 25%	37% 24% 17% 28%	
3	25	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0	0%	
3	25	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	24 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	8 dokumen	200%	4 dokumen	1 dokumen	4%	
3	25	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200%	1 dokumen	0	0%	
3	25	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%	
3	25	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0%	1 dokumen	0	0%	
3	25	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	42 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	17%	
3	25	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	100%	3 dokumen	0	0%	
3	25	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	17%	
3	25	3	PROGRAM PENGELOAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.30%	0.30%	0.30%	1,22%	407%	0.3%	-0.35%	86%	
3	25	3.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	1 dokumen	6%	
3	25	3.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil	18 laporan	3 laporan	3 laporan	5 laporan	167%	3 laporan	1 dokumen	6%	
3	25	3.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0	0%	
3	25	3.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	20 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0%	2 dokumen	0	0%	
3	25	3.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0%	2 dokumen	0	0%	
3	25	3.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Raw, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0%	2 dokumen	0	0%	
3	25	4	PROGRAM PENGELOAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0.20%	0.20%	0.20%	0.30%	150%	0.20%	-0.36%	-56%	
3	25	4.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0%	2 dokumen	0	0%	
3	25	4.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah dokumen kelayakan usaha Pembudidayaan Ikan Kecil skala kecil	60 dokumen	4 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50%	12 dokumen	2 dokumen	3%	
3	25	4.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TOPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TOPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500 dokumen	50 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	100%	100 dokumen	0	0%	
3	25	4.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	1612 ton	250 ton	275 ton	649,06	236%	300 Ton	36 Ton	2%	
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pemasaran pasar terhadap produksi hasil perikanan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	0%	0%	
3	25	6.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen izin usaha Pengolahan hasil Perikanan	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	2 dokumen	8%	
3	25	6.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	15 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	250%	3 dokumen	0	0%	
3	25	6.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	200%	2 dokumen	0	0%	
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	5%	5%	8%	160%	160%	5%	2.00%	40%	
3	25	5.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	150%	2 dokumen	1 dokumen	10%	



Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2024	2025	2026	
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)		✓	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.19	0,5	-0.71%	0.5	0.5	0.5	
2.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)		✓	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-0.21	0,3	-0.35%	0.3	0.3	0.3	
3.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)		✓	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.09	0,2	-0.36%	0.20	0.2	0.2	
4.	Persentase Usaha Perikanan Darat yang memenuhi Ketentuan (%)			5	5	5	5	5	3	5	2	5	5	5	
5.	Persentase Penyediaan Pasar Terhadap Poduksi Hasil Perikanan (%)		✓	90	90	90	90	90	10	90	0	90	90	90	
6.	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)		✓	75	80	85	90	95	93.3	80	94.9	85	90	95	
7.	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan (%)		✓	8	8	8	8	8	0	8	0	8	8	8	
8.	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)		✓	2100	2100	2100	2100	2100	2259	2100	0	2100	2100	2100	
9.	Angka Kecukupan Protein (gr/kapita)		✓	57	57	57	57	57	67.4	57	0	57	57	57	
10.	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan (%)		✓	5	4	3	2	2	6.45	4	0	3	2	2	
11.	Persentase Pangan Segar Aman (%)		✓	55	60	65	70	75	0	60	0	65	70	75	
12.	Nilai LHE AKIP DKPKP			89.92	89.93	89.94	89.5	89.96	63.45	89.93	0	89.94	89.5	89.96	
13.	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi			1. 90%	1. 90%	1. 90%	1. 90%	1. 90%	90	1. 90%	25%	1. 90%	1. 90%	1. 90%	
14.	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik			2. 90%	2. 90%	2. 90%	2. 90%	2. 90%	90	2. 90%	33%	2. 90%	2. 90%	2. 90%	
15.	Persentase peningkatan kompetensi aparatur			3. 90%	3. 90%	3. 90%	3. 90%	3. 90%	90	3. 90%	22%	3. 90%	3. 90%	3. 90%	
16.	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			4. 90%	4. 90%	4. 90%	4. 90%	4. 90%	90	4. 90%	15%	4. 90%	4. 90%	4. 90%	

Pangandaran, 4 Juli 2024
Kepala Dinas
DINAS KELAUTAN PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN
SARLAN, S.P.
NIP. 19670706 199003 1 010

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Kab. Pangandaran			Rp 53.253.515.846	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Kab. Pangandaran			Rp 17.383.364.183	
2	NON URUSAN	Kab. Pangandaran			Rp 5.694.598.111	NON URUSAN	Kab. Pangandaran			Rp 4.792.437.183	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pangandaran	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%	Rp 5.694.598.111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pangandaran	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%	Rp 4.792.437.183	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	Rp 106.830.356	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	Rp 15.310.000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Rp 71.600.507	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Rp 15.310.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	Rp 35.229.849	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Rp -	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	4 dokumen	Rp 4.636.507.560	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	4 dokumen	Rp 3.814.637.183	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	Rp 4.519.295.513	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	Rp 3.814.637.183	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 44.629.349	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp -	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 61.123.849	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp -	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	Rp 11.458.849	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	Rp -	
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 40.581.349	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp -	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 40.581.349	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp -	
14	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 38.161.349	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp -	
15	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Rp 38.161.349	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Rp -	
16	Administrasi Kepegawaian Peranngtk Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 34.786.349	Administrasi Kepegawaian Peranngtk Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp -	
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang	Rp 34.786.349	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang/Bulan	Rp -	
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 dokumen	Rp 406.893.379	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 dokumen	Rp 184.434.000	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 13.289.337	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp -	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	Rp 105.150.282	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	Rp 76.544.000	
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	Rp 66.794.349	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	Rp 12.340.000	
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Rp 18.354.364	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Rp 5.000.000	
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 dokumen	Rp 36.301.249	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21 dokumen	Rp 17.300.000	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 laporan	Rp 106.397.449	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18 laporan	Rp 73.250.000	
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroinik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp 60.606.349	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroinik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp -	
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp -	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp 170.000.000	
27	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Rp -	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Rp 170.000.000	
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	Rp 290.475.011	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	Rp 491.256.000	
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Penyurat	12 Laporan	Rp 22.554.349	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Penyurat	12 Laporan	Rp -	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 70.588.049	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 99.600.000	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 197.332.613	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 391.656.000	
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	Rp 140.362.758	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	Rp 116.800.000	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikaknya	11 unit	Rp 81.807.274	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikaknya	11 unit	Rp 81.800.000	
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Rp 30.589.135	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Rp 20.000.000	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Rp 27.966.349	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Rp 15.000.000	
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Kab. Pangandaran			Rp 11.393.360.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Kab. Pangandaran			Rp 643.000.000	
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kab. Pangandaran	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan	8%	Rp 7.653.250.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kab. Pangandaran	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadanngan Pangan	8%	Rp -	
38	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	Rp 7.653.250.000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	Rp -	
39	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Infrastruktur Pendukung kemandirian Pangan yang Tersedia	5 Unit	Rp 7.653.250.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Infrastruktur Pendukung kemandirian Pangan yang Tersedia	5 Unit	Rp -	
40	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Pangandaran	1. Angka Kecukupan Energi 2. Angka Kecukupan Protein	1. 2100 2. 57	Rp 2.901.580.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Pangandaran	1. Angka Kecukupan Energi 2. Angka Kecukupan Protein	1. 2100 2. 57	Rp 575.000.000	
41	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	Rp 39.930.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1 dokumen	Rp 25.000.000	
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	24 laporan	Rp 39.930.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	24 laporan	Rp 25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
43	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 133.100.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 500.000.000	
44	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 ton	Rp 133.100.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	76 ton	Rp 500.000.000	
45	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen	Rp 2.728.550.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen	Rp 50.000.000	
46	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pangandaran	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 laporan	Rp 2.728.550.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pangandaran	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	Rp 50.000.000	
47	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Pangandaran	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	2%	Rp 638.880.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Pangandaran	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	2%	Rp 50.000.000	
48	Penyusunan Peta Kerentanandan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Peta Kerentanandan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	Rp 133.100.000	Penyusunan Peta Kerentanandan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Peta Kerentanandan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	Rp -	
49	Penyusunan, Pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentananan Pangan	Kab. Pangandaran	Peta Analisis Ketahanan dan Kerentananan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Rp 133.100.000	Penyusunan, Pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentananan Pangan	Kab. Pangandaran	Peta Analisis Ketahanan dan Kerentananan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Rp -	
50	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	Rp 505.780.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 50.000.000	
51	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pengadaan Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp 399.300.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pengadaan Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp -	
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota	5 laporan	Rp 106.480.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota	5 laporan	Rp 50.000.000	
53	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Pangandaran	Persentase pangan segar aman	70%	Rp 199.650.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Pangandaran	Persentase pangan segar aman	70%	Rp 18.000.000	
54	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	Rp 199.650.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 18.000.000	
55	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	2 Dokumen	Rp 66.550.000	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	2 Dokumen	Rp -	
56	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Laporan	Rp 133.100.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 laporan	Rp 18.000.000	
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Pangandaran			Rp 36.165.557.735	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Pangandaran			Rp 11.947.927.000	
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Pangandaran	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0.20%	Rp 6.211.853.555	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Pangandaran	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0.2%	Rp 7.771.277.000	
59	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen	Rp 266.200.000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen	Rp -	
60	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	Rp 133.100.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	Rp -	
61	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5 Rekomendasi	Rp 133.100.000	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5 Rekomendasi	Rp -	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
62	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen kelayakan usaha Pembudidaya Ikan Kecil skala kecil	16 Dokumen	Rp 927.540.350	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen kelayakan usaha Pembudidaya Ikan Kecil skala kecil	4 dokumen	Rp 1.850.000.000	
63	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	16 Kelompok	Rp 295.315.350	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	16 Kelompok	Rp -	
64	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	Rp 133.100.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	Rp -	
65	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok	Rp 166.375.000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok	Rp 1.850.000.000	
66	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50 Kelompok	Rp 332.750.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50 Kelompok	Rp -	
67	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Izin Usaha Pembudidaya Ikan Kecil	150 Dokumen	Rp 239.508.000	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Izin Usaha Pembudidaya Ikan Kecil	150 Dokumen	Rp -	
68	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kotayang Ditetapkan	1 Rekomendasi	Rp 133.100.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kotayang Ditetapkan	1 Rekomendasi	Rp -	
69	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	325 Rekomendasi	Rp 106.408.000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	325 Rekomendasi	Rp -	
70	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Pangandaran	Jumlah produksi perikanan budidaya	350 Ton	Rp 4.778.605.205	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Pangandaran	Jumlah produksi perikanan budidaya	325 Ton	Rp 5.921.277.000	
71	Penyediaan Data dan informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp 66.550.000	Penyediaan Data dan informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp -	
72	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23 Unit	Rp 1.597.200.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	Rp 3.741.277.000	
73	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Kab. Pangandaran	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	15 Dokumen	Rp 232.925.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Kab. Pangandaran	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	15 Dokumen	Rp -	
74	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	Rp 1.484.380.205	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	Rp 70.000.000	
75	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pangandaran	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Unit	Rp 66.550.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pangandaran	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Unit	Rp 2.110.000.000	
76	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	10 Unit	Rp 665.500.000	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	10 Unit	Rp -	
77	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Darat	Kab. Pangandaran	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	Rp 665.500.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Darat	Kab. Pangandaran	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	Rp -	
78	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kab. Pangandaran	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	90%	Rp 1.302.898.986	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kab. Pangandaran	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	90%	Rp 680.000.000	
79	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikana Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	5 Dokumen	Rp 391.446.006	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikana Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	5 Dokumen	Rp -	
80	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kab. Pangandaran	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang Diterbitkan	50 Dokumen	Rp 250.000.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kab. Pangandaran	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang Diterbitkan	50 Dokumen	Rp -	
81	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pangandaran	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	Rp 141.446.006	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pangandaran	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	Rp -	
82	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	2 dokumen	Rp 911.452.980	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	2 dokumen	Rp 680.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
83	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Ton	Rp 411.452.980	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.5 Ton	Rp 80.000.000	
84	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	Rp 500.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	Rp 600.000.000	
85	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Pangandaran	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30%	Rp 25.615.095.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Pangandaran	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30%	Rp 3.461.483.500	
86	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan	3 dokumen	Rp 21.365.895.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan	1 dokumen	Rp 2.365.000.000	
87	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Pangandaran	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Rp 199.650.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Pangandaran	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Rp -	
88	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pangandaran	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 unit	Rp 13.876.245.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pangandaran	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		Rp -	
89	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pangandaran	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	9 Unit	Rp 7.290.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 unit	Rp 2.365.000.000	
90	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil	3 Laporan	Rp 2.289.000.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil	1 laporan	Rp 30.000.000	
91	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	2573 Orang	Rp 2.009.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 orang	Rp 30.000.000	
92	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	4 Kelompok	Rp 130.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan kecil	Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	4 Kelompok	Rp -	
93	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, kemitraan Usaha	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan dan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12 Unit Usaha	Rp 150.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, kemitraan Usaha	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan dan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12 Unit Usaha	Rp -	
94	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 dokumen	Rp 1.234.200.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 dokumen	Rp 1.066.483.500	
95	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pangandaran	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	Rp 266.200.000	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pangandaran	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	Rp -	
96	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pangandaran	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	Rp 968.000.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pangandaran	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 layanan	Rp 1.066.483.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
97	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	2 Dokumen	Rp 242.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	2 Dokumen	Rp -	
98	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Pangandaran	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 121.000.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Pangandaran	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp -	
99	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	2 Rekomendasi	Rp 121.000.000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	2 Rekomendasi	Rp -	
100	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	2 Dokumen	Rp 242.000.000	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	2 Dokumen	Rp -	
101	Penetapan Persyaratan dan prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Pangandaran	Jumlah Persyaratan dan prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 121.000.000	Penetapan Persyaratan dan prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Pangandaran	Jumlah Persyaratan dan prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp -	
102	Penerbitan Rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	2 Rekomendasi	Rp 121.000.000	Penerbitan Rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	2 Rekomendasi	Rp -	
103	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	2 Dokumen	Rp 242.000.000	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	2 Dokumen	Rp -	
104	Penetapan Kapal Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Pangandaran	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 121.000.000	Penetapan Kapal Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Pangandaran	Jumlah Persyaratan dan prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp -	
105	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	Rp 121.000.000	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	Rp -	
106	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Pangandaran	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	5%	Rp 3.035.710.194	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Pangandaran	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	5%	Rp 35.166.500	
107	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	2 dokumen	Rp 3.035.710.194	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	1 dokumen	Rp 35.166.500	
108	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Pelaku Usaha	Rp 106.480.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan nya sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Pelaku Usaha	Rp -	
109	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Pelaku Usaha	Rp 2.929.230.194	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	9 Pelaku Usaha	Rp 35.166.500	



Parigi, 1 Juli 2024
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan
Kewenangan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran
SARLAN, S.IP.
NIP. 19780612 200801 1 007

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Penting

lampiran 4

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran / Volume (Rp.)	Catatan
1	PP Peningkatan Produksi Perikanan - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dusun Cireuma, Kab. Pangandaran	1 Paket	Rp. 2.000.000.000,-	Muesrenbang Kecamatan
2	PP Peningkatan Produksi Perikanan - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DUSUN CITARUNGGANG RT 003 RW 005 , Kab. Pangandaran	12 paket	Rp. 138.200.000,-	Muesrenbang Kecamatan
3	PP Peningkatan Produksi Perikanan - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dusun Cibuluh I/II Desa Cibuluh, Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	Rp. 150.000.000,-	Muesrenbang Kecamatan
4	PP Peningkatan Produksi Perikanan - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	RW 08 Palatar Agung Dusun Ciawitali, Kab. Pangandaran		Rp. 50.000.000,-	Muesrenbang Kecamatan
Jumlah				Rp. 2.338.200.000,-	

Parigi, 1 Juli 2023
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran



Tabel T-C.33.
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025
 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**
Kabupaten Pangandaran
SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				17.383.364.183				26.584.598.922	APBD II
					NON URUSAN				4.792.437.183				5.823.161.465	APBD II
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%	4.792.437.183	APBD II		1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%	5.823.161.465	APBD II
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2 dokumen	15.310.000	APBD II		2 dokumen	67.862.958	APBD II
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKPKP	7 dokumen	15.310.000	APBD II	DKPKP	-	67.862.958	APBD II
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		4 dokumen	3.814.637.183	APBD II		4 dokumen	4.764.582.084	APBD II
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKPKP	39 Orang/Bulan	3.814.637.183	APBD II/DAU	DKPKP	-	4.764.582.084	APBD II/DAU
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 dokumen	184.434.000	APBD II		7 dokumen	346.015.348	APBD II
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKPKP	72 paket	76.544.000	APBD II	DKPKP	-	109.553.813	APBD II
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKPKP	5 paket	12.340.000	APBD II	DKPKP	-	71.197.880	APBD II
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKPKP	5 paket	5.000.000	APBD II	DKPKP	-	22.757.895	APBD II
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKPKP	21 dokumen	17.300.000	APBD II	DKPKP	-	40.704.780	APBD II
3	25	01	2.06	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKPKP	18 laporan	73.250.000	APBD II	DKPKP	-	101.800.980	APBD II
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1 dokumen	170.000.000	APBD II		-	250.000.000	APBD II

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
3	25				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKPKP	1 unit	170.000.000		DKPKP	1 unit	250.000.000	APBD II
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 dokumen	491.256.000	APBD II		3 dokumen	261.727.724	APBD II
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKPKP	12 laporan	99.600.000	APBD II	DKPKP	-	66.991.580	APBD II
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKPKP	12 laporan	391.656.000	APBD II	DKPKP	-	194.736.144	APBD II
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 dokumen	116.800.000	APBD II		3 dokumen	132.973.351	APBD II
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DKPKP	11 unit	81.800.000	APBD II	DKPKP	-	79.210.805	APBD II
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKPKP	10 unit	20.000.000	APBD II	DKPKP	-	28.192.666	APBD II
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKPKP	3 unit	15.000.000	APBD II	DKPKP	-	25.569.880	APBD II
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				643.000.000				453.871.000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Angka Kecukupan Energi 2. Angka Kecukupan Protein		1. 2100 2. 57	575.000.000	APBD II		1. 2100 2. 57	263.538.000	APBD II
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		1 dokumen	25.000.000	APBD II		2 dokumen	43.923.000	APBD II
2	09	03	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Pangandaran	24 laporan	25.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran	24 dokumen	43.923.000	APBD II
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota		1 dokumen	500.000.000	APBD II		1 dokumen	146.410.000	APBD II
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	76 ton	500.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran	10 ton	146.410.000	APBD II
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		1 dokumen	50.000.000	APBD II, APBD 1, APBN/DAK		-	73.205.000	APBD II, APBD 1, APBN/DAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026			
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	09	03	2.04	02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Kab. Pangandaran	1 laporan	50.000.000	APBD II, APBD 1, APBN/DAK	Kab. Pangandaran	-	73.205.000	APBD II, APBD 1, APBN/DAK
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)			2%	50.000.000	APBD II		2%	117.128.000	APBD II
2	09	04	2.02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 dokumen	50.000.000	APBD II		2 dokumen	117.128.000	APBD II
2	09	04	2.02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Kab. Pangandaran	5 laporan	50.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran	-	117.128.000	APBD II
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman			70%	18.000.000	APBD II		70%	73.205.000	APBD II
2	09	05	2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	18.000.000	APBD II		2 dokumen	73.205.000	APBD II
2	09	05	2.01	05		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Kab. Pangandaran	2 laporan	18.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran	-	73.205.000	APBD II
03	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					11.947.927.000				20.307.566.457	
03	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			0.20%	7.771.277.000			0.2%	3.645.955.726	
03	25	04	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah dokumen kelayakan usaha Pembudidaya Ikan Kecil skala kecil			4 dokumen	1.850.000.000	APBD II		4 dokumen	183.012.500	APBD II
03	25	04	2.02	03		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	1.850.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	183.012.500	APBD II
03	25	04	2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya			325 Ton	5.921.277.000	APBD II		350 ton	3.462.943.226	APBD II
03	25	04	2.04	02		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	3.741.277.000	APBD II	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1.756.920.000	APBD II
03	25	04	2.04	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	70.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1.632.818.226	APBD II
03	25	04	2.04	05		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit	2.110.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	73.205.000	APBD II
03	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan			90%	680.000.000	APBD II		90%	828.057.518	APBD II
03	25	06	2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku			2 dokumen	680.000.000	APBD II		2 dokumen	828.057.518	APBD II

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
03	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.5 Ton	80.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	328.057.518	APBD II
03	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Pelaku Usaha	600.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	500.000.000	APBD II
03	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		0.30%	3.461.483.500	APBD II		0.3%	12.611.400.000	APBD II
03	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan		1 dokumen	2.365.000.000	APBD II		3 dokumen	9.461.700.000	APBD II
03	25	03	2.01	04	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 unit	2.365.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	9.461.700.000	APBD I/ APBD II/APBN (DAK)
03	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil		1 laporan	30.000.000	APBD II		3 laporan	2.084.900.000	APBD II
03	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 orang	30.000.000	APBD II	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2.084.900.000	APBD II
03	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 dokumen	1.066.483.500	APBD II		2 dokumen	1.064.800.000	APBD II
03	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 layanan	1.066.483.500	APBD II	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1.064.800.000	APBD II
03	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan		5%	35.166.500	APBD II		5%	3.222.153.213	APBD II
03	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan		1 dokumen	35.166.500	APBD II		2 dokumen	3.222.153.213	APBD II
03	25	05	2.01	07	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Pelaku Usaha	35.166.500	APBD II		-	3.222.153.213	APBD II

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana

